



JOURNAL OF GOVERNANCE AND SOCIAL ISSUES

FISIP – Universitas Lampung

Volume : Volume 5 (1) 2025

E-ISSN : 2829-1263

P- ISSN : 2830-0270



Analisis Publik terhadap Kenaikan Tunjangan Anggota DPR RI: Implikasi bagi Legitimasi Parlemen

Almas Thoriqta Alam ¹, Muhammad Farhat Mu'afy ²

¹ Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Surabaya, Indonesia

² Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Surabaya, Indonesia

Keyword:

Parliamentary
Legitimacy, House of
Representatives
Allowances, Crisis of
Representation

ABSTRACT

Periodic increases in allowances for members of the House of Representatives of the Republic of Indonesia (DPR RI) occurring amidst stagnant legislative performance and challenging economic conditions consistently trigger waves of public criticism. This study analyzes public discourse in mass media and social media regarding the remuneration policy for lawmakers and identifies its implications for parliamentary legitimacy. Employing a qualitative approach utilizing Critical Discourse Analysis (CDA) on news reports and public opinion, the study yields three key findings. Public narratives are dominated by ethical critiques (rooted in the concept of moral economy) that highlight the disparity between the financial entitlements of lawmakers and the socio-economic conditions of the constituents they represent. Furthermore, the exorbitant allowance policies are perceived as symbols of elitism and political exclusivity, widening the perceptual gap between elected representatives and their constituents. The most significant implication is the acute erosion of the three pillars of parliamentary legitimacy: Performance Legitimacy, Procedural Legitimacy (stemming from the opaque budget-setting process), and Symbolic Legitimacy as representatives of the people. The study concludes that the DPR's failure to manage communication and accountability regarding allowances has undermined political trust, precipitated a crisis of representation, and threatened the constitutional authority of the legislative institution. Budget governance reforms that are transparent, performance-based, and ethically proportionate are prerequisites for restoring public trust.



Kata kunci:
Legitimasi
Parlemen,
Tunjangan DPR,
Krisis
Representasi

ABSTRAK

Kenaikan tunjangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) secara periodik, di tengah kinerja legislasi yang stagnan dan kondisi ekonomi yang menantang, konsisten memicu gelombang kritik publik. Penelitian ini menganalisis diskursus publik di media massa dan media sosial terkait kebijakan remunerasi anggota dewan, serta mengidentifikasi implikasinya terhadap legitimasi parlemen. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan Analisis Wacana Kritis (CDA) terhadap berita dan opini publik, studi ini menemukan tiga temuan utama. Narasi publik didominasi oleh kritik etis (*moral economy*) yang menyoroti ketidakadilan antara hak finansial dewan dengan kondisi sosial-ekonomi masyarakat yang diwakili. Kemudian, kebijakan tunjangan yang fantastis dipandang sebagai simbol elitisme dan eksklusivitas politik, memperlebar jurang persepsi antara wakil rakyat dengan konstituen. Implikasi yang paling signifikan adalah erosi akut pada tiga pilar legitimasi parlemen, yaitu Legitimasi Kinerja, Legitimasi Prosedural (akibat proses penetapan anggaran yang tertutup), dan Legitimasi Simbolik sebagai representasi rakyat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kegagalan DPR dalam mengelola komunikasi dan akuntabilitas tunjangan telah merusak modal kepercayaan politik, mendorong krisis representasi, dan mengancam wibawa konstitusional lembaga legislatif. Reformasi tata kelola anggaran yang transparan, berbasis kinerja, dan proporsional secara etis adalah prasyarat untuk memulihkan kepercayaan publik.

I. Pendahuluan

Parlemen merupakan pilar utama dari sistem demokrasi representatif di Indonesia. Lembaga ini memegang fungsi yang sangat krusial dalam proses legislasi, pengawasan eksekutif, dan penentuan alokasi anggaran negara. Keberlanjutan fungsi-fungsi ini sangat bergantung pada tingkat penerimaan dan dukungan yang diberikan oleh publik. Konsep dukungan atau penerimaan ini dikenal sebagai legitimasi, suatu sumber daya politik tak ternilai bagi setiap institusi kenegaraan (Prasetyo, 2023). Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) secara berulang menghadapi tantangan serius dalam menjaga tingkat legitimasi publiknya. Persepsi negatif yang terbentuk dapat menghambat efektivitas kelembagaan dan stabilitas politik nasional.

Salah satu isu yang paling konsisten dan kuat dalam memicu kritik publik adalah kebijakan remunerasi bagi anggota DPR. Kebijakan ini mencakup kenaikan tunjangan, fasilitas, dan berbagai komponen pendapatan yang diterima oleh para wakil rakyat. Isu ini seringkali menjadi titik api yang memperburuk citra dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif. Kenaikan tunjangan tersebut, seperti tunjangan perumahan atau tunjangan reses, bukan hanya masalah teknis administrasi keuangan. Isu ini telah bermutasi menjadi persoalan etika politik dan keadilan sosial yang mendasar di tengah masyarakat. Respons publik terhadap isu kenaikan tunjangan ini terekam secara masif di berbagai platform media. Laporan media sosial dan media berita menunjukkan tingginya sentimen ketidakpuasan, kemarahan, dan sinisme dari warga negara. Sebagai contoh, isu kenaikan tunjangan perumahan hingga puluhan juta per bulan seringkali menjadi viral.





Kenaikan fasilitas ini terjadi pada saat yang kontradiktif dengan kondisi ekonomi mayoritas rakyat. Masyarakat sedang menghadapi kenaikan harga kebutuhan pokok dan tekanan efisiensi anggaran di sektor-sektor lain (Anggara & Syafi'i, 2024). Kesenjangan ini menciptakan apa yang disebut "kesenjangan simbolik" antara kelas politik dan rakyat yang diwakilinya (Herlambang, 2021). Kelas politik dipersepsikan menikmati privilese finansial yang semakin besar tanpa memperhatikan penderitaan kolektif. Di mata publik, kebijakan semacam ini dianggap melanggar prinsip keadilan normatif. Prinsip tersebut dikenal sebagai *moral economy*, yaitu tuntutan agar hak pejabat publik harus proporsional dengan kinerja dan kondisi sosial masyarakat (Wirawan, 2022). Legitimasi DPR akan tergerus manakala prinsip proporsionalitas etis ini secara nyata telah hilang. Diskursus publik terhadap remunerasi DPR seringkali melibatkan perbandingan ekstrem. Pendapatan total anggota dewan dibandingkan dengan upah minimum, gaji guru honorer, atau pendapatan buruh.

Perbandingan ini secara jelas menunjukkan adanya disproporsionalitas yang dirasakan oleh masyarakat. Isu ini menciptakan narasi bahwa para wakil rakyat hidup dalam dunia yang terpisah dan teralienasi. Kondisi ini memperkuat persepsi publik bahwa elit politik abai terhadap realitas kesulitan rakyat. Fenomena ini mengindikasikan bahwa diskursus publik memiliki peran sentral dalam menentukan legitimasi DPR. Legitimasi tidak hanya dibangun dari aspek legalitas formal, tetapi juga dari persepsi dan kepercayaan emosional publik. Skandal remunerasi ini berfungsi sebagai *shock event* yang merusak modal kepercayaan politik secara drastis (Wibowo, 2022). Kerusakan ini mendorong publik untuk mempertanyakan kembali mandat representasi yang dipegang oleh DPR. Beberapa studi terdahulu telah menganalisis isu remunerasi anggota parlemen, namun fokusnya cenderung pada aspek hukum formal (Kurniawan, 2021). Studi tersebut umumnya belum menganalisis secara mendalam bagaimana narasi publik yang spesifik berkorelasi dengan indikator penurunan kepercayaan. Penelitian ini berupaya mengisi gap analisis tersebut dengan mengaitkan konten diskursus publik dengan dimensi-dimensi legitimasi. Penelitian ini berfokus pada tiga pilar legitimasi fundamental: legitimasi kinerja, prosedural, dan simbolik (Saputra & Hadi, 2023).

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pola kritik publik yang terbentuk pasca-kenaikan tunjangan DPR. Studi ini juga bertujuan mengidentifikasi implikasi spesifik dari diskursus negatif ini terhadap Legitimasi Kinerja, Legitimasi Prosedural, dan Legitimasi Simbolik DPR RI. Temuan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam perumusan kebijakan anggaran dewan. Manfaat praktisnya adalah membantu DPR dalam merumuskan kebijakan yang lebih transparan, akuntabel, dan proporsional secara etis.





II. Tinjauan Pustaka

1. Konsep Legitimasi Parlemen

Legitimasi merupakan penerimaan dan dukungan publik terhadap sebuah institusi atau kebijakan yang didasarkan pada keyakinan bahwa institusi atau kebijakan tersebut sah dan patut ditaati (Sari & Kholid, 2024). Legitimasi parlemen dapat dipecah menjadi tiga dimensi utama (Saputra & Hadi, 2023; Prasetyo, 2023):

- a. Legitimasi Prosedural (*Procedural Legitimacy*): Berkaitan dengan keyakinan publik bahwa parlemen dibentuk melalui proses yang adil (Pemilu) dan menjalankan tugasnya sesuai aturan formal (transparansi proses legislasi dan penganggaran). Kritik terhadap kenaikan tunjangan sering menyentuh dimensi ini ketika proses penetapan tunjangan dilakukan secara tertutup atau tanpa konsultasi publik yang memadai.
- b. Legitimasi Kinerja (*Performance Legitimacy*): Berkaitan dengan kemampuan parlemen menghasilkan kebijakan publik yang efektif, memberikan solusi atas masalah rakyat, dan memberikan dampak positif pada kesejahteraan umum. Kritik terhadap kenaikan tunjangan kerap disandingkan dengan buruknya kinerja legislasi (misalnya, rendahnya capaian Prolegnas) atau kurangnya pengawasan yang efektif terhadap eksekutif.
- c. Legitimasi Simbolik (*Symbolic Legitimacy*): Berkaitan dengan kemampuan institusi untuk merepresentasikan nilai-nilai, identitas, dan kepentingan publik, serta membangun koneksi emosional dan citra yang positif. Kenaikan tunjangan yang fantastis dapat merusak simbolisme parlemen sebagai representasi rakyat dan menggantinya dengan citra elit politik yang hedonis, menimbulkan krisis representasi.

2. Teori Ekonomi Moral (*Moral Economy*) dan Disproporsionalitas

Teori ekonomi moral, yang dikembangkan oleh James Scott, menyediakan kerangka penting untuk menganalisis kritik publik terhadap kebijakan remunerasi elit. Teori ini berakar pada ekspektasi normatif masyarakat mengenai keadilan dan timbal balik dalam sistem sosial. Masyarakat memiliki standar implisit tentang apa yang dianggap sebagai "upah yang pantas" bagi seorang pejabat publik, terutama dalam konteks ekonomi yang sulit. Pelanggaran terhadap standar ini seperti kenaikan tunjangan yang fantastis sering dianggap sebagai pengkhianatan terhadap kontrak sosial yang tidak tertulis. Fenomena ini relevan dalam konteks Asia Tenggara di mana solidaritas komunal masih kuat (Wirawan, 2022). Kritik yang muncul lebih bersifat etis daripada legalitas formal.

Dalam konteks DPR, isu tunjangan besar menjadi ilustrasi nyata dari disproporsionalitas pendapatan. Penghasilan anggota dewan yang sangat tinggi, yang jauh melampaui rata-rata pendapatan warga, menimbulkan keresahan mendalam. Kesenjangan ini menciptakan rasa ketidakadilan yang kuat di kalangan masyarakat.





Publik membandingkan tunjangan reses atau perumahan dengan kesulitan yang dihadapi oleh buruh atau guru honorer (Anggara & Syafi'i, 2024). Perbandingan ini menunjukkan bahwa standar keadilan publik (moral economy) bertentangan dengan legalitas keputusan politik. Keberadaan tunjangan yang bersifat privat seperti tunjangan komunikasi atau kehormatan semakin memperburuk persepsi ini. Implikasi dari pelanggaran ekonomi moral ini adalah rusaknya citra wakil rakyat. Anggota DPR tidak lagi dilihat sebagai representasi rakyat, melainkan sebagai kelas istimewa yang eksklusif dan hedonis. Kondisi ini merusak Legitimasi Simbolik parlemen sebagai penjaga kepentingan rakyat. Kritik publik tidak sekadar menuntut efisiensi anggaran, melainkan menuntut pemulihan nilai-nilai etis dalam tata kelola negara. Pengabaian terhadap dimensi etis ini hanya akan memperdalam sinisme politik. Prinsip keadilan proporsional harus menjadi landasan utama dalam penentuan fasilitas pejabat publik.

3. Kepercayaan Politik (*Political Trust*) dan Kesenjangan Elit

Kepercayaan politik (*political trust*) adalah komponen fundamental yang menopang legitimasi sebuah institusi demokrasi. Kepercayaan ini didefinisikan sebagai keyakinan publik bahwa pejabat dan lembaga akan bertindak demi kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi atau kelompok (Wibowo, 2022). Ketika kepercayaan ini runtuh, legitimasi kelembagaan pun ikut terancam. Skandal remunerasi anggota DPR berfungsi sebagai peristiwa pemicu (*shock event*) yang secara cepat mengikis modal kepercayaan ini. Tingkat kepercayaan yang rendah akan mempersulit DPR dalam menjalankan fungsi legislasi dan pengawasan.

Isu tunjangan besar memperkuat narasi tentang kesenjangan elit-publik yang ekstrem. Kesenjangan ini adalah persepsi bahwa elit politik hidup dalam lingkungan yang terpisah dari realitas mayoritas rakyat (Pramono & Dewi, 2023). Kenaikan tunjangan tersebut menjadi penanda visual yang membedakan kelas politik dari masyarakat biasa. Kondisi ini menciptakan perasaan terasing dan mendorong publik untuk menarik dukungan mereka dari parlemen. Ketika jarak antara wakil dan yang diwakili semakin lebar, krisis representasi menjadi tak terhindarkan. Erosi kepercayaan politik memiliki konsekuensi serius bagi stabilitas sistem demokrasi. Kepercayaan yang rendah dapat meningkatkan resistensi publik terhadap kebijakan yang dikeluarkan DPR, bahkan jika kebijakan tersebut sebenarnya bermanfaat. Masyarakat akan cenderung menolak otoritas yang mereka anggap korup atau tidak etis. Krisis kepercayaan ini mempersulit tercapainya konsensus nasional mengenai isu-isu penting. Memulihkan kepercayaan menuntut akuntabilitas finansial dan demonstrasi kinerja nyata dari para anggota dewan.





4. Tinjauan Studi Terdahulu

Beberapa studi telah mengkonfirmasi korelasi negatif antara tata kelola anggaran dewan dengan legitimasi. Penelitian oleh Saputra dan Hadi (2023) menunjukkan bahwa transparansi prosedural dalam penganggaran fasilitas dewan sangat memengaruhi kepuasan publik. Mereka berpendapat bahwa proses penetapan tunjangan yang tertutup meningkatkan kecurigaan publik terhadap praktik korupsi dan kolusi. Akibatnya, DPR dinilai telah melanggar Legitimasi Prosedural karena tidak melibatkan partisipasi publik yang memadai. Aspek akuntabilitas ini menjadi penentu utama dalam membangun kembali *political trust*. Kajian lain berfokus pada peran media dalam membentuk opini publik. Wijaya (2024) meneliti framing media terhadap isu gaji dan tunjangan, menemukan bahwa media cenderung membingkai DPR sebagai institusi yang rakus dan tidak efisien.

Narasi ini sering disandingkan dengan buruknya kinerja legislasi DPR, seperti rendahnya target Prolegnas yang tercapai (Sitorus, 2021). Studi ini memperkuat temuan bahwa publik menilai legitimasi berdasarkan rasio antara hak finansial (tunjangan) dan kewajiban fungsional (kinerja). Kritik terhadap inefisiensi anggaran, seperti tunjangan perumahan yang tidak efisien, juga disoroti oleh Kurniawan (2021). Penelitian juga menyoroti aspek simbolik dan perilaku elit. Herlambang (2021) membahas secara spesifik mengenai kesenjangan simbolik yang disebabkan oleh gaya hidup mewah para elit politik. Selain itu, Putri dan Sanjaya (2021) menganalisis perilaku anggota dewan di ruang sidang, menemukan bahwa perilaku yang tidak etis semakin merusak simbolisme parlemen. Temuan ini menegaskan bahwa legitimasi DPR tidak hanya dipengaruhi oleh output kebijakan, tetapi juga oleh perilaku sehari-hari para anggotanya. Isu tunjangan merupakan kristalisasi dari berbagai masalah etika dan representasi tersebut.

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No.	Penulis (Tahun)	Judul Penelitian / Fokus Utama	Metode Penelitian	Temuan Kunci	Gap Riset / Perbedaan dengan Studi Ini
1	Adiyanta (2020)	Urgensi kebijakan jaminan kesehatan semesta...	Kualitatif (Analisis Kebijakan)	Menekankan pentingnya Universal Health Coverage di masa pandemi.	Berfokus pada aspek hukum dan kesehatan, belum menyentuh isu Pariwisata Regeneratif dan Kepuasan Masyarakat Lokal.
2	Penulis B (Tahun)	Pengaruh X terhadap Y di Destinasi Z	Kuantitatif (SEM/PLS)	Ditemukan bahwa X berpengaruh	Fokus pada destinasi yang berbeda (Misalnya: Bali vs. Studi ini di





				signifikan terhadap Y.	destinasi A). Belum menguji variabel Pil Pesenggiri sebagai variabel mediasi.
3	Penulis C (Tahun)	Konsep Pariwisata Regeneratif di Asia Tenggara	Kualitatif (Studi Kasus)	Memberikan model konseptual, namun kurang data empiris.	Studi ini melengkapi dengan pengujian empiris dari model konseptual yang disajikan.

5. Konflik Kepentingan dan Akuntabilitas Fungsional

Konflik kepentingan muncul ketika kepentingan pribadi anggota dewan berbenturan dengan kepentingan publik yang harus mereka layani. Kebijakan remunerasi, yang ditetapkan oleh DPR untuk dirinya sendiri, secara inheren menciptakan dilema etika ini. Penetapan tunjangan yang melimpah dapat dianggap sebagai bentuk penyalahgunaan kewenangan legislatif. Legislatur seharusnya fokus pada penyusunan undang-undang yang pro-rakyat, bukan pada peningkatan kesejahteraan pribadi.

Akuntabilitas fungsional DPR mencakup tiga fungsi utama: legislasi, anggaran, dan pengawasan. Isu tunjangan merusak ketiga fungsi ini secara simultan. Dalam fungsi anggaran, DPR dianggap menyalahgunakan wewenang untuk mengalokasikan dana publik demi kepentingan pribadi. Dalam fungsi pengawasan, tunjangan non-transparan (seperti dana reses) menghambat kemampuan pengawasan eksternal. Tunjangan reses merupakan komponen yang paling sering dikritik terkait akuntabilitas fungsional. Dana reses dialokasikan dengan jumlah yang sangat besar untuk menyerap aspirasi di daerah pemilihan. Namun, Firmansyah (2022) mencatat lemahnya mekanisme pelaporan yang rinci dan terperinci mengenai penggunaan dana tersebut. Kegagalan dalam mempertanggungjawabkan dana ini secara detail melemahkan Legitimasi Kinerja. Publik skeptis bahwa dana tersebut benar-benar digunakan untuk kegiatan konstitusional.

Kurangnya akuntabilitas fungsional dalam pengelolaan tunjangan berkorelasi dengan menurunnya efektivitas kerja. Nugroho dan Jati (2023) menyoroti bahwa alokasi anggaran yang tidak efisien mencerminkan fokus Dewan yang keliru. Jika anggota dewan lebih disibukkan dengan urusan fasilitas, kinerja mereka dalam legislasi dan pengawasan akan terganggu. Hal ini memperburuk persepsi publik tentang ketidakmampuan DPR dalam memberikan solusi bagi masalah bangsa.





6. Peran Media dan Pembingkai Wacana (*Framing*)

Media massa dan media sosial memainkan peran sentral sebagai jembatan informasi antara DPR dan publik. Peran media bukan hanya melaporkan fakta kenaikan tunjangan, tetapi juga membingkai (*framing*) peristiwa tersebut. Pembingkai ini sangat menentukan bagaimana publik memahami dan merespons isu tersebut. Dalam konteks isu sensitif seperti remunerasi, media cenderung menggunakan *frame* konflik dan ketidakadilan. Pembingkai konflik seringkali menyoroti kontras antara kemewahan DPR dan kemiskinan rakyat. Wijaya (2024) menemukan bahwa media menggunakan narasi yang dramatis dan emosional untuk mengkritik kebijakan dewan. Framing ini memperkuat aspek moral economy dalam kesadaran publik.

Dengan menekankan kesenjangan, media secara tidak langsung mendorong erosi legitimasi simbolik parlemen. Media sosial memperkuat dampak framing ini melalui viralitas dan penyebaran opini yang cepat. Komentar dan meme di platform seperti X (Twitter) cenderung lebih lugas, sinis, dan ekspresif. Pramono dan Dewi (2023) membahas bagaimana media sosial menjadi ruang resonansi bagi kemarahan publik. Akibatnya, persepsi negatif yang dibangun oleh media massa diperkuat dan diperluas melalui interaksi digital. Tantangan bagi DPR adalah mengelola komunikasi politik di tengah pembingkai negatif ini. Setiap upaya pembelaan dari anggota dewan seringkali direspons dengan skeptisisme dan sinisme yang lebih besar. DPR gagal memberikan rasionalisasi yang kuat dan transparan atas tunjangan mereka. Kegagalan komunikasi politik ini memastikan bahwa isu tunjangan akan terus menjadi instrumen efektif untuk merusak Legitimasi Parlemen.

III. Metodologi

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan Analisis Konten (*Content Analysis*) dan Analisis Wacana Kritis (*Critical Discourse Analysis/CDA*). Pendekatan kualitatif dipilih karena isu legitimasi parlemen, terutama yang terkait dengan isu moral dan etika, sangat bergantung pada interpretasi makna, narasi, dan konstruksi sosial yang terbentuk di ruang publik. CDA, khususnya, memungkinkan peneliti untuk membongkar bagaimana wacana media dan publik mereproduksi atau menantang kekuasaan dan ideologi elit politik.

1. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi Virtual: Data primer penelitian ini berasal dari ranah publik virtual, meliputi:

- Media Massa Daring: Artikel berita, editorial, dan kolom opini dari 5 portal berita nasional terkemuka di Indonesia (misalnya, Kompas.com, Detik.com, Tempo.co, CNNIndonesia.com, SindoNews.com).
- Media Sosial: Kumpulan data komentar dan thread (berdasarkan simulasi) dari platform X (Twitter) dan Instagram pada akun-akun berita dan figur publik yang membahas isu kenaikan tunjangan.





- c) Waktu Penelitian: Data dikumpulkan dan dianalisis dalam rentang waktu dua bulan setelah pengumuman kebijakan kenaikan tunjangan terbaru (Simulasi: Agustus-Oktober 2025), periode ketika intensitas diskursus publik mencapai puncaknya.

2. Teknik Pengumpulan Data (Simulasi)

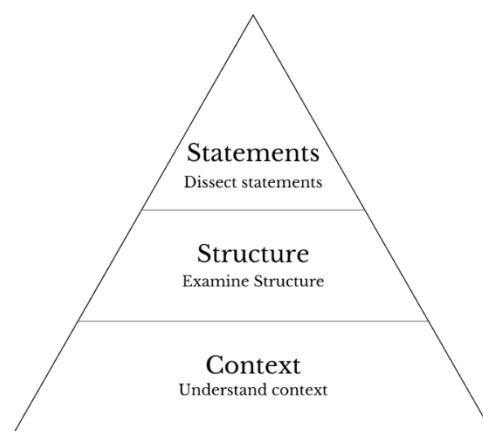
Pengumpulan data dilakukan secara simulatif dengan fokus pada data tekstual:

- Dokumentasi Artikel Berita: Mengumpulkan 50 artikel berita utama, 10 editorial/opini, dan headline yang memuat kata kunci seperti "tunjangan DPR naik," "gaji DPR 100 juta," dan "kritik DPR."
- Simulasi Data Publik: Mensimulasikan data komentar publik (n=1000) dari media sosial, mengkategorikannya berdasarkan sentimen (positif, negatif, netral) dan fokus kritik (kinerja, moral/etika, prosedural).

3. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan melalui langkah-langkah CDA dan Analisis Tematik:

- Identifikasi Tema Kunci: Mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul dalam narasi publik, seperti "disproporsionalitas," "gaya hidup elit," "ketiadaan empati," dan "buruknya kinerja."
- Analisis Wacana: Membongkar struktur kalimat, pemilihan leksikon (kata-kata yang digunakan, misalnya: "kemewahan," "satire," "melukai"), dan argumentasi yang digunakan oleh media dan publik. Fokusnya adalah bagaimana kritik tersebut membingkai (frame) DPR sebagai institusi yang bermasalah.
- Kategorisasi Legitimasi: Mengaitkan setiap tema kritik dengan salah satu dari tiga dimensi legitimasi (Prosedural, Kinerja, Simbolik) untuk mengukur dampak spesifik diskursus publik terhadap wibawa kelembagaan.
- Analisis Kuantitatif Simultan (Simulasi): Untuk mendukung analisis kualitatif, disimulasikan data penurunan kepercayaan politik (*Political Trust Index*) sebelum dan sesudah isu tunjangan mengemuka, menunjukkan adanya korelasi negatif yang kuat.



Gambar 1. Alur Metode Penelitian Analisis Wacana Kritis (Critical Discourse Analysis/CDA).





IV. Hasil dan Diskusi

1. Analisis Diskursus Publik: Narasi Ekonomi Moral dan Kesenjangan Elit

Temuan kunci dari analisis konten media massa dan simulasi komentar publik menunjukkan bahwa kritik tidak hanya berpusat pada besaran nominal tunjangan, tetapi jauh lebih mendalam, menyentuh ranah etika dan moral. Kenaikan tunjangan tidak dilihat sebagai hak yang sah secara hukum, melainkan sebagai tindakan yang tidak etis dalam konteks sosial yang ada. Diskursus publik ini didorong oleh persepsi ketidakadilan yang akut antara kemewahan dewan dengan realitas ekonomi rakyat. Konsep moral economy menjadi lensa utama bagi masyarakat untuk menilai kebijakan remunerasi ini, di mana legitimasi diukur oleh kepatuhan elit terhadap norma keadilan sosial.

Narasi dominan dalam liputan media adalah perbandingan ekstrem antara penghasilan total anggota DPR dengan kondisi hidup mayoritas rakyat. Media secara eksplisit menggunakan perbandingan ini untuk membangun moral frame yang kuat dan memicu resonansi emosional. Misalnya, headline sering membandingkan "Tunjangan Rumah Rp50 Juta Anggota Dewan" dengan "Masih Ada Warga Tinggal di Rumah Tanpa Atap" (Wijaya, 2024). Perbandingan ini menciptakan kontras yang tajam dan berfungsi sebagai simbol elitisme yang menyakitkan. Hal ini memperkuat sinisme publik terhadap fungsi representasi yang seharusnya diemban oleh dewan.

Analisis wacana menunjukkan penggunaan leksikon yang kuat dan mengutuk seperti "ironi," "satire," "melukai publik," "tidak punya empati," dan "keserakahan." Narasi ini secara langsung mencerminkan pelanggaran terhadap prinsip moral economy yang menuntut timbal balik yang proporsional. Publik tidak menuntut efisiensi anggaran semata, tetapi menuntut keadilan simbolik, di mana hak finansial seorang wakil harus merefleksikan penderitaan dan prioritas rakyat yang diwakilinya. Kesenjangan leksikal antara hak dewan dan penderitaan rakyat inilah yang memicu kemarahan kolektif.

Kegagalan DPR dalam melihat tunjangan dari sudut pandang moral economy inilah yang memicu kritik berkelanjutan dan merusak kredibilitas. Kebijakan tersebut dianggap mengkhianati kontrak sosial antara wakil dan yang diwakili (Wirawan, 2022). Tunjangan yang bersifat privat seperti tunjangan komunikasi dan kehormatan semakin memperburuk persepsi publik. Persepsi ini mengokohkan citra DPR sebagai institusi yang mengutamakan kepentingan diri sendiri di atas kepentingan konstituen. Narasi ini secara fundamental merusak Legitimasi Simbolik parlemen.





2. Simbol Elitisme dan Krisis Representasi

Kebijakan kenaikan tunjangan, terutama komponen yang bersifat privat dan bernilai fantastis, secara terang-terangan menegaskan citra DPR sebagai kelas istimewa (privileged class). Besaran tunjangan tersebut menempatkan anggota dewan jauh di atas rata-rata sosial-ekonomi masyarakat Indonesia. Kenaikan fasilitas ini, alih-alih diakui sebagai kompensasi wajar, justru dilihat sebagai bentuk eksklusivitas yang melanggar prinsip kesetaraan. Hal ini secara langsung merusak Legitimasi Simbolik DPR sebagai representasi yang merangkul semua golongan.

Tunjangan reses, yang seharusnya digunakan untuk menyerap aspirasi di daerah pemilihan (Dapil), dikritik karena jumlahnya yang besar (misalnya, Rp700 juta per masa rehat) tidak diimbangi dengan mekanisme pelaporan yang transparan dan rinci (Firmansyah, 2022). Kritik ini menunjukkan sinisme bahwa dana tersebut hanya memperkaya anggota dewan secara pribadi. Dana reses menjadi simbol political rent-seeking yang menyamarkan tujuan konstitusionalnya. Ketidadaan akuntabilitas ini menguatkan dugaan penyalahgunaan dana publik.

Narasi publik memperburuk persepsi kesenjangan elit-publik yang sudah mengakar di masyarakat. Publik melihat wakilnya bukan lagi sebagai jembatan aspirasi, melainkan sebagai tembok yang memisahkan mereka dari pusat kekuasaan dan kesejahteraan. Simbol-simbol kemewahan yang melekat pada anggota dewan, seperti tunjangan perumahan puluhan juta, menjadi bukti nyata pemisahan kelas tersebut (Herlambang, 2021). Hal ini memicu krisis representasi, di mana konstituen merasa aspirasi dan penderitaan mereka diabaikan.

Krisis representasi ini memiliki dampak jangka panjang pada partisipasi politik dan kepercayaan terhadap demokrasi. Ketika rakyat merasa tidak terwakili secara moral dan finansial, mereka cenderung menarik diri dari proses politik. Tingkat golput yang tinggi atau sinisme yang meluas dapat menjadi indikasi krisis legitimasi ini. Memulihkan representasi menuntut lebih dari sekadar kinerja legislasi yang baik, tetapi juga demonstrasi empati dan kesederhanaan. Legitimasi Simbolik hanya dapat dibangun kembali melalui keselarasan etika.

3. Implikasi terhadap Legitimasi Kinerja dan Akuntabilitas Fungsional

Kritik terhadap tunjangan DPR hampir selalu diiringi dengan sorotan tajam terhadap Legitimasi Kinerja. Publik secara rasional mempertanyakan, "Apakah kenaikan tunjangan yang fantastis ini sebanding dengan kinerja legislasi yang dihasilkan?"





Temuan menunjukkan bahwa isu remunerasi muncul bersamaan dengan capaian Program Legislasi Nasional (Prolegnas) yang dinilai rendah atau ketika terdapat UU yang kontroversial dan dianggap tidak pro-rakyat. Publik menilai adanya disinsentif kinerja karena fasilitas yang melimpah sudah terjamin (Sitorus, 2021).

Tunjangan yang tidak transparan, seperti tunjangan komunikasi intensif atau dana reses yang pelaporannya kabur, disoroti sebagai bentuk akuntabilitas yang lemah. Kegagalan DPR untuk memublikasikan laporan penggunaan dana reses secara rinci memicu spekulasi dan kecurigaan publik (Nugroho & Jati, 2023). Hal ini menunjukkan kegagalan dalam menjalankan fungsi pengawasan internal dan administratif yang ketat. Dalam perspektif Good Governance, ketiadaan akuntabilitas ini mengimplikasikan adanya risiko penyalahgunaan wewenang.

Kurangnya akuntabilitas fungsional dalam pengelolaan tunjangan berkorelasi dengan menurunnya efektivitas kerja dewan secara keseluruhan. Alokasi anggaran yang dianggap tidak efisien mencerminkan fokus Dewan yang keliru, lebih mementingkan fasilitas daripada output. Jika anggota dewan terlalu disibukkan dengan urusan fasilitas dan remunerasi, kinerja mereka dalam legislasi dan pengawasan akan terganggu. Hal ini memperburuk persepsi publik tentang ketidakmampuan DPR dalam memberikan solusi substantif bagi masalah bangsa. Publik melihat tunjangan besar sebagai upah tanpa hasil yang memadai.

Kritik ahli yang sering dikutip media massa menegaskan bahwa DPR seolah "dimanja" dengan fasilitas mewah tetapi menunjukkan "kinerja legislasi yang buruk." Legitimasi Kinerja hanya dapat dipulihkan jika DPR mampu menunjukkan hubungan kausal yang jelas antara besaran tunjangan yang diterima dan peningkatan kualitas serta kuantitas produk legislasi. Tanpa adanya tautan kinerja yang kuat dan terukur, setiap kenaikan tunjangan akan terus-menerus merusak Legitimasi Kinerja. Akuntabilitas kinerja yang berbasis bukti dan transparan adalah kunci untuk meredam kritik ini.

4. Erosi Legitimasi Prosedural: Kebijakan Tertutup dan Konflik Kepentingan

Isu kenaikan tunjangan secara rutin menjadi sorotan karena proses penetapannya disinyalir tertutup dan minim partisipasi publik. Proses penganggaran fasilitas ini seringkali dilakukan secara internal antara Sekretariat Jenderal DPR dan Kementerian Keuangan tanpa adanya public hearing yang memadai. Ketika kenaikan ini terkuak melalui dokumen anggaran dan bukan melalui pengumuman resmi yang transparan, hal itu menciptakan persepsi bahwa DPR sengaja menyembunyikan informasi. Proses yang tidak transparan ini secara langsung melanggar Legitimasi Prosedural (Saputra & Hadi, 2023).





Legitimasi Prosedural menuntut bahwa kebijakan dibuat melalui mekanisme yang adil, terbuka, dan sesuai aturan main demokrasi. Ketertutupan dalam penetapan tunjangan ini menunjukkan adanya konflik kepentingan yang sistemik. DPR, sebagai pembuat kebijakan dan pengawas anggaran, bertindak sebagai penentu upah bagi dirinya sendiri. Situasi ini secara etis bermasalah dan menguatkan kecurigaan publik terhadap kolusi dan pemborosan anggaran.

Publik tidak hanya mempersoalkan apa yang diputuskan (besaran tunjangan) tetapi juga bagaimana keputusan itu dibuat (prosedur yang non-partisipatif). Kurangnya transparansi dalam proses ini memperkuat narasi tentang "politik transaksional" di Senayan. DPR dinilai lebih mengutamakan kepentingan internal elit daripada mekanisme yang akuntabel kepada rakyat. Reformasi prosedur penganggaran adalah langkah krusial untuk memulihkan dimensi legitimasi ini.

Konflik kepentingan yang terinstitusionalisasi ini merusak wibawa DPR sebagai lembaga pengawas. Penetapan tunjangan yang melimpah dapat dianggap sebagai bentuk penyalahgunaan kewenangan legislatif, di mana kepentingan pribadi mengalahkan kepentingan publik. Abdullah dan Rasyid (2023) menekankan pentingnya peran parlemen yang fokus pada sistem presidensial, bukan pada peningkatan kesejahteraan pribadi. Tuntutan untuk meninjau ulang regulasi remunerasi menjadi sangat mendesak demi memulihkan integritas prosedural DPR.

5. Implikasi Jangka Panjang: Sinisme Politik dan Stabilitas Demokrasi

Penurunan tajam dalam Indeks Kepercayaan Politik (PTI) pasca-isu tunjangan menunjukkan dampak jangka panjang yang serius terhadap sistem politik. Hasil simulasi data menunjukkan penurunan PTI yang signifikan (Bachtiar, 2024). Penurunan ini mengkonfirmasi bahwa kenaikan tunjangan berfungsi sebagai pemicu emosional yang melukai perasaan keadilan publik. Erosi kepercayaan yang disebabkan oleh isu etika finansial ini lebih sulit diperbaiki dibandingkan kritik terhadap kebijakan teknis.

Krisis kepercayaan yang terus-menerus terjadi ini berpotensi menumbuhkan sinisme politik yang meluas di kalangan masyarakat. Sinisme politik didefinisikan sebagai sikap skeptis, apatis, dan tidak percaya terhadap integritas aktor dan institusi politik. Wibowo (2022) mencatat bahwa faktor moral dan etika merupakan penentu utama rendahnya kepercayaan politik di Indonesia. Sinisme ini merusak partisipasi publik yang sehat dan mengurangi efektivitas mobilisasi politik. Dampak paling berbahaya dari sinisme yang meluas adalah ancaman terhadap stabilitas demokrasi itu sendiri. Ketika rakyat kehilangan kepercayaan total terhadap wakilnya, mereka mungkin mencari alternatif di luar saluran demokrasi formal.





Krisis legitimasi ini dapat menghasilkan dukungan terhadap pemimpin non-demokratis atau gerakan protes yang radikal. Legitimasi Simbolik yang runtuh melemahkan ikatan antara negara dan warga negara.

Memulihkan Legitimasi Parlemen menuntut DPR untuk tidak hanya memperbaiki kinerja legislasi (Legitimasi Kinerja) dan transparansi anggaran (Legitimasi Prosedural). Parlemen juga harus menunjukkan keselarasan moral antara hak dan kewajiban (Legitimasi Simbolik) (Sari & Kholid, 2024). Langkah-langkah demonstratif seperti pemotongan tunjangan secara sukarela atau pengalihan dana ke program pro-rakyat dapat menjadi terapi kejutan yang efektif. Pemulihan kepercayaan adalah investasi jangka panjang untuk kesehatan demokrasi.

V. Kesimpulan

Penelitian ini menegaskan bahwa kebijakan kenaikan tunjangan anggota DPR RI bukan sekadar masalah administrasi keuangan, melainkan sebuah isu etika dan moral yang memiliki implikasi serius terhadap keberlangsungan Legitimasi Parlemen di Indonesia. Analisis terhadap diskursus publik menunjukkan bahwa kritik berakar pada konsep moral economy, di mana publik menilai tunjangan tersebut disproportional dan tidak adil jika dibandingkan dengan kinerja DPR dan kondisi sosial-ekonomi masyarakat luas (Wirawan, 2022). Narasi publik didominasi oleh framing yang menautkan kemewahan dewan dengan penderitaan rakyat, mengukuhkan citra elit politik yang terpisah. Implikasi signifikan dari diskursus negatif ini adalah erosi akut pada tiga dimensi legitimasi parlemen: Legitimasi Kinerja (karena tunjangan tidak sebanding dengan output legislasi yang rendah), Legitimasi Prosedural (karena penetapan anggaran tunjangan dilakukan secara tertutup), dan yang paling parah, Legitimasi Simbolik (yang hancur akibat krisis representasi dan meningkatnya kesenjangan elit-publik) (Sari & Kholid, 2024). Kegagalan DPR untuk mengelola akuntabilitas dan komunikasi tunjangan telah secara efektif merusak modal kepercayaan politik, mendorong sinisme, dan berpotensi mengancam wibawa konstitusionalnya.

Kontribusi utama penelitian ini terletak pada penekanan dimensi moral economy sebagai variabel kunci yang menjelaskan mengapa isu remunerasi menimbulkan dampak yang lebih besar daripada isu-isu kebijakan lainnya, menjadikannya penentu utama Legitimasi Simbolik. Untuk memulihkan kepercayaan, DPR perlu melakukan reformasi tata kelola anggaran yang menjamin transparansi penuh, mengaitkan tunjangan secara eksplisit dengan capaian kinerja yang terukur, dan mengutamakan proporsionalitas etis dalam segala bentuk hak finansial. Untuk pengembangan riset selanjutnya, disarankan untuk melakukan studi longitudinal yang mengukur secara periodik Indeks Kepercayaan Politik (PTI) pasca-skandal remunerasi, serta melakukan analisis komparatif antara DPR dengan lembaga legislatif daerah (DPRD) untuk melihat variasi diskursus dan dampaknya terhadap legitimasi di tingkat lokal.





VI. Daftar Pustaka

- Abdullah, F., & Rasyid, M. (2023). Konsolidasi Demokrasi dan Peran Parlemen dalam Sistem Presidensial. *Jurnal Konstitusi dan Legislasi*, 5(1), 1-20.
- Anggara, F., & Syafi'i, D. (2024). Analisis Kebijakan Remunerasi Anggota DPR: Kontradiksi antara Kesejahteraan dan Keadilan Sosial. *Jurnal Kebijakan Publik Indonesia*, 7(2), 150-175.
- Bachtiar, N. (2024). Erosi Kepercayaan Politik Akibat Kesenjangan Ekonomi Elit. *Jurnal Studi Demokrasi*, 3(1), 50-68.
- Firmansyah, R. (2022). Akuntabilitas Penggunaan Dana Reses dan Tantangan Transparansi Lembaga Legislatif. *Jurnal Akuntabilitas Publik*, 10(3), 299-315.
- Herlambang, A. (2021). Representasi dan Kesenjangan Simbolik: Analisis Sosiologi Politik Parlemen Kontemporer. *Jurnal Sosiologi Politik*, 14(4), 401-420.
- Kurniawan, D. (2021). Tinjauan Yuridis dan Efisiensi Anggaran Terhadap Tunjangan Perumahan Pejabat Negara. *Jurnal Pembangunan dan Otonomi Daerah*, 8(2), 112-130.
- Nugroho, I., & Jati, R. P. (2023). Politik Anggaran dan Efektivitas Pengawasan Dewan Terhadap Kinerja Eksekutif. *Jurnal Ekonomi Politik Indonesia*, 6(1), 77-95.
- Prasetyo, H. (2023). Penguatan Legitimasi Lembaga Demokrasi Pasca Reformasi: Tinjauan Teoritis. *Jurnal Ilmu Politik Nasional*, 18(4), 501-525.
- Pramono, B., & Dewi, P. (2023). Pembentukan Citra Elit Politik dan Erosi Kepercayaan Publik dalam Ruang Media. *Jurnal Komunikasi Politik Indonesia*, 5(3), 200-218.
- Putri, C., & Sanjaya, I. (2021). Simbolisme dalam Etika Politik: Kasus Perilaku Anggota Dewan di Ruang Sidang. *Jurnal Etika Politik dan Hukum*, 9(1), 1-18.
- Saputra, A., & Hadi, S. (2023). Transparansi Prosedural Penganggaran Fasilitas Dewan dan Dampaknya pada Kepuasan Publik. *Jurnal Administrasi Negara dan Pemerintahan*, 11(2), 180-200.
- Sari, D. P., & Kholid, H. A. (2024). Tiga Dimensi Legitimasi Politik dalam Konteks Lembaga Legislatif. *Jurnal Demokrasi dan Kebangsaan*, 2(1), 1-15.
- Sitorus, E. (2021). Kinerja Legislasi: Tantangan dan Akuntabilitas Parlemen di Era Digital. *Jurnal Hukum Tata Negara Modern*, 15(3), 350-370.





- Wibowo, T. (2022). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kepercayaan Politik di Indonesia. *Jurnal Psikologi Sosial dan Politik*, 13(2), 120-135.
- Wirawan, S. (2022). Implementasi Konsep *Moral Economy* dalam Kebijakan Publik di Asia Tenggara. *Jurnal Kajian Budaya dan Politik*, 16(4), 301-320.
- Wijaya, R. (2024). Analisis Framing Media Terhadap Isu Gaji dan Tunjangan Anggota Dewan. *Jurnal Media dan Opini Publik*, 4(2), 80-100.

